



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

Nomor : 317

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan dan menetapkan Daftar Informasi Publik serta melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu selaku Ketua PPID tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Atas Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
7. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025
- KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang

Pada tanggal, 02 Juni 2025

**Kepala Diskominfostandi Mahulu selaku
Ketua PPID Utama,**



MARKUS WAN, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710713 200112 1 003

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - ***Ujoh Bilang***;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - ***Ujoh Bilang***;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
 SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG DAFTAR
 INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 NOMOR: 317

TABEL KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

No	Informasi	Dasar Hukum	Pertimbangan/Potensi Resiko	Status Akses	Jangka Waktu
1	Laporan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin ASN	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Melindungi hak pribadi dan asas praduga tak bersalah	Tertutup tanpa persetujuan pihak terkait	Terbuka jika pelapor dan terlapor menyetujui
2	Berkas pemeriksaan internal pelanggaran ASN (BAP, notulensi, dll.)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Mengandung data pribadi dan belum final	Tertutup	Sampai proses selesai atau ada persetujuan
3	SK hukuman disiplin ASN dan identitasnya	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Memuat informasi pribadi dan sanksi disiplin	Tertutup	Terbuka bila ASN memberikan persetujuan tertulis
4	Data kesehatan ASN untuk pengangkatan/pensiun	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data medis bersifat pribadi	Tertutup	Terbuka bila digunakan untuk kepentingan dinas

5	Biodata/FIP elektronik ASN (database kepegawaian)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Data pribadi dan potensi penyalahgunaan	Terbuka sebagian untuk administrasi	Tertutup jika menyangkut sanksi/hukuman
6	Laporan audit/inspeksi internal yang belum final	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i	Berpotensi disalahgunakan jika belum final	Tertutup	Sampai dilaporkan resmi ke BPK atau selesai
7	Surat/dokumen internal belum final (kebijakan, notulen, konsep surat)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Dapat menimbulkan kesimpangsiuran jika dibuka	Tertutup	Sampai dokumen ditetapkan secara resmi
8	Identitas korban kekerasan, perempuan, anak	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU Perlindungan Anak	Melindungi hak dan keselamatan korban	Tertutup	Terbuka jika ada izin tertulis bermaterai
9	Data seleksi jabatan struktural dan hasil penilaian	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i	Mencegah kolusi dan konflik kepentingan	Tertutup	Sampai pelantikan resmi dilakukan
10	Data izin usaha: nilai investasi, titik lokasi, pemilik usaha	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Rahasia perusahaan, lindungi daya saing	Tertutup	Terbuka bila diperlukan untuk proses hukum
11	Nama dan Alamat Wajib Pajak sebagai Pemilik Objek Pajak Kendaraan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi wajib pajak	Tertutup kecuali dengan persetujuan tertulis	Sampai wajib pajak memberikan izin tertulis
12	Source code / database aplikasi pelayanan publik (misalnya Samsat)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Melindungi sistem dari gangguan eksternal	Tertutup	Sampai sistem diganti atau ditinggalkan
13	Rencana lokasi dan detail jembatan/jalan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e	Mencegah spekulasi tanah dan konflik sosial	Tertutup	Sampai pembebasan tanah selesai
14	Dokumen teknis bangunan/jalan/jembatan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Melindungi strategi dan kekayaan intelektual	Tertutup	Sampai diumumkan secara resmi
15	Data pelanggar Perda	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Melindungi privasi dan reputasi pribadi	Tertutup	10 tahun
16	Rencana operasi Satpol PP	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Menjaga keberhasilan operasi penegakan	Tertutup	5 tahun

17	Jadwal pengamanan pejabat dan objek vital	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c	Menghindari ancaman keamanan terhadap pejabat	Tertutup	3 tahun
18	Identitas pelapor dugaan korupsi dan benturan kepentingan	UU 14/2008 Pasal 17 ayat 2	Melindungi pelapor dan mendukung partisipasi publik	Tertutup	Sampai ada persetujuan tertulis/pengadilan
19	Identitas masyarakat dalam aduan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Privasi dan keamanan pelapor	Tertutup	Terbuka jika ada izin tertulis
20	Dokumen penawaran tender (harga satuan, strategi teknis)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Rahasia usaha dan kompetisi pasar	Tertutup	Sampai penetapan penyedia barang/jasa
21	Dokumen evaluasi pengadaan barang/jasa	UU 14/2008 Pasal 17 b & h	Strategi penilaian kompetitor	Tertutup	Sampai penetapan penyedia
22	Alamat protokol internet nonpublik (IP internal)	UU 14/2008 Pasal 17 g	Potensi penyalahgunaan akses	Tertutup	Selama masih digunakan
23	Data aset/jaringan komunikasi vital pemerintah	UU 14/2008 Pasal 17 g	Keamanan nasional	Tertutup	Selama masih digunakan
24	Topologi jaringan server OPD	UU 14/2008 Pasal 17 g	Ancaman serangan siber	Tertutup	Selama digunakan
25	Identitas pelapor media sosial/internal	UU 14/2008 Pasal 17 ayat 2	Perlindungan partisipasi publik	Tertutup	Sampai ada izin/persidangan
26	Dokumen pembebasan tanah pembangunan umum	UU 14/2008 Pasal 17 e	Spekulasi harga dan konflik sosial	Tertutup	Sampai tahapan selesai
27	Data santunan dampak sosial pembangunan nasional	UU 14/2008 Pasal 17 h & i	Konflik sosial dan miss-informasi	Tertutup	Sampai selesai dan disetujui
28	Rencana investasi asing	UU Penanaman Modal	Persaingan tidak sehat	Tertutup	Sampai realisasi/persidangan
29	Rencana investasi dalam negeri	UU Penanaman Modal	Strategi bisnis terungkap	Tertutup	Sampai realisasi
30	Data perusahaan individual	UU 14/2008 Pasal 17 b	Rahasia dagang	Tertutup	Sampai izin tertulis

31	Berkas proses perizinan	UU 14/2008 Pasal 17 b	Persaingan usaha tidak sehat	Tertutup	Sampai proses selesai
32	Dokumen izin usaha	UU 14/2008 Pasal 17 b	Strategi bisnis	Tertutup	Sampai izin selesai
33	Hasil pengawasan perusahaan	UU 14/2008 Pasal 17 b	Rahasia audit	Tertutup	Sampai masa pengawasan berakhir
34	Soal ujian pelatihan ASN	UU 14/2008 Pasal 17 d & j	Objektivitas dan transparansi	Tertutup	2 Tahun
35	Hasil evaluasi peserta pelatihan	UU 14/2008 Pasal 17 h	Privasi dan intelektualitas	Tertutup	2 Tahun
36	Hasil evaluasi tenaga pengajar	UU 14/2008 Pasal 17 h	Profesionalisme	Tertutup	2 Tahun
37	Arsip/pustaka mengandung SARA/pornografi	UU Perpustakaan, UU 14/2008	Ketidaksesuaian norma sosial	Tertutup	25 Tahun
38	Uji lab kesehatan hewan dan pakan	UU 14/2008 Pasal 17 b	Keamanan data hasil	Tertutup	1 Tahun
39	Pengujian mutu benih pangan dan hortikultura	UU 14/2008 Pasal 17 b	Hasil belum final	Tertutup	Sampai terbit sertifikat
40	Data biometrik (sidik jari, retina, DNA, dll)	UU 14/2008 Pasal 17 j	Keamanan dan privasi	Tertutup	Selamanya atau sesuai hukum
41	Data hasil investigasi internal	UU 14/2008 Pasal 17 i	Berpotensi disalahgunakan	Tertutup	Sampai selesai
42	Surat internal belum final	UU 14/2008 Pasal 17 a	Mencegah spekulasi publik	Tertutup	Sampai jadi kebijakan
43	Identitas saksi kasus disiplin	UU 14/2008 Pasal 17 h	Perlindungan saksi	Tertutup	Sampai ada izin tertulis
44	Data keuangan pribadi ASN	UU 14/2008 Pasal 17 h	Privasi pegawai	Tertutup	Selamanya
45	Data korban KDRT/perempuan dan anak	UU 14/2008 Pasal 17 h	Lindungi hak korban	Tertutup	Sampai korban menyetujui
46	Laporan psikologis korban kekerasan	UU 14/2008 Pasal 17 h	Sangat pribadi	Tertutup	Dengan persetujuan tertulis
47	Hasil evaluasi untuk pemutusan kontrak	UU 14/2008 Pasal 17 i	Sengketa dan kerahasiaan	Tertutup	Sampai kontrak selesai

48	Pengaduan masyarakat terhadap pejabat	UU 14/2008 Pasal 17 ayat 2	Melindungi pelapor	Tertutup	Sampai selesai
49	Rekaman rapat internal tertutup	UU 14/2008 Pasal 17 a	Informasi belum final	Tertutup	Sampai resmi dibuka
50	Data penerima bantuan sosial yang mengandung informasi sensitif	UU 14/2008 Pasal 17 h	Privasi warga penerima	Tertutup	Sampai ada izin tertulis

**Kepala Diskominfo Mahulu selaku
Ketua PPID Utama,**



MARKUS WAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710713 200112 1 003